

ANALISIS PENDAPATAN, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN TINGKAT
KEMISKINAN RUMAH TANGGA PESANGGEM PROYEK
PERHUTANAN SOSIAL DI RPH BANTERAN
KPH BANYUMAS BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH

oleh

Alusdin S.M.T. Sinaga *)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan tentang adanya sekelompok masyarakat sekitar kawasan hutan yang "lapar lahan" bukan merupakan suatu hal yang aneh dan baru bagi peneliti-peneliti masalah sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dan terutama bagi pihak Perhutani.

Kelompok masyarakat ini kerap kali menimbulkan masalah yang serius dan kompleks seperti halnya: (i) penggarapan lahan dengan kelainan kemampuan rendah dan terjal, lahan marginal dan kritis, untuk penggunaan yang tidak sesuai; (ii) penyerobotan lahan milik pemerintah seperti lahan Perhutani yang seringkali mengakibatkan menurunnya kondisi hutan; dan (iii) timbulnya sengketa pemilikan lahan baik diantara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau keadaan ini dibiarkan tanpa penanganan yang serius dan berkelanjutan, maka kelestarian hutan khususnya dan kelestarian lingkungan umumnya akan semakin terancam.

Sebenarnya keadaan tersebut terjadi secara wajar berdasarkan tuntutan hidup mereka yang dicirikan oleh kerawanan sosial ekonomi yang ada. Mereka hidup dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, distribusi pemilikan lahan dan distribusi pendapatan yang relatif timpang antara petani tunakisma, buruh tani, petani gurem dan petani luas serta masalah kemiskinan yang kronis. Tindakan mereka dapat disebut wajar selama pemecahan tidak ada karena bagaimanapun juga mereka harus hidup.

Menyadari permasalahan tersebut maka Perhutani bekerjasama dengan Ford Foundation dan PSP-IPB telah berupaya memecahkan masalah yang ada dengan melaksanakan program yang bersifat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) kelompok sasaran. Program tersebut dikenal sebagai "*Social Forestry Project*" (Proyek

*) Mahasiswa S₁ Fakultas Pertanian Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, di bawah bimbingan Dr Ir Bunasor dan Dr Ir Bungaran Saragih.

Perhutanan Sosial). Proyek Perhutanan Sosial mempunyai dua tujuan pokok. Pertama, bagi pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan fungsi-fungsi hutan dan pengamanan produksi, serta menjaga kelestariannya. Kedua, bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, bertujuan untuk memperoleh hasil-hasil hutan guna mendapatkan lapangan kerja guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga petani (Departemen Kehutanan, 1987).

Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercipta "keharmonisan hubungan ketergantungan" antara masyarakat dengan alam, baik dari segi sosial ekonomi maupun ekologi. Sedangkan dalam jangka pendek diharapkan terbinanya Kelompok Tani Hutan atau Pesanggem sebagai kelompok masyarakat yang langsung merasakan pentingnya hutan bagi kehidupan mereka dan akhirnya mereka memiliki sekaligus menularkan rasa tanggung jawab akan pentingnya kelestarian hutan sekaligus sumber pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan.

Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada latar belakang permasalahan yang ada maka telah diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak Proyek Perhutanan Sosial terhadap (i) Tingkat pendapatan rumah tangga pesanggem, (ii) Distribusi pendapatan RT pesanggem, (iii) Tingkat kemiskinan RT pesanggem dan (iv) Keterikatan pesanggem terhadap lahan sawah yang dimiliki berdasarkan distribusi pemilikan lahan sawah.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai (i) Bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan Perhutani yang berhubungan dengan masalah sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, (ii) Informasi bagi masyarakat sekitar hutan akan pentingnya hutan dan lingkungannya dan (iii) Bahan referensi bagi peneliti-peneliti di bidang yang sama atau berhubungan dengan masalah sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini maka diformulasikan tiga hipotesis berikut :

- (1) Tingkat pendapatan rata-rata RT pesanggem pada kondisi "dengan proyek" lebih tinggi dibanding pada kondisi "tanpa proyek"
- (2) Distribusi pendapatan RT pesanggem pada kondisi "dengan proyek" relatif lebih baik dibanding pada kondisi "tanpa proyek"
- (3) Proyek Perhutanan Sosial membawa peningkatan kesejahteraan hidup RT pesanggem (mengurangi tingkat kemiskinan).

METODE PENELITIAN

Daerah dan Waktu Penelitian

Daerah penelitian termasuk wilayah administrasi Desa Dermakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan (akhir Juli s/d akhir Oktober 1989).

Metode Pengambilan Contoh dan Jenis Data

Responden ditentukan dengan cara *full census* yakni seluruh rumah tangga pesanggem sebanyak 53 RT. Berdasarkan luas pemilikan lahan seluruh responden diklasifikasikan menjadi 4 stratum, yaitu:

stratum I, adalah pesanggem yang tidak memiliki lahan;
stratum II, memiliki lahan 0.01 ha - 0.24 ha;
stratum III, memiliki lahan 0.25 ha - 0.49 ha;
stratum IV, memiliki lahan lebih dari 0.5 ha.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk memperoleh tingkat presisi data yang baik dilakukan melalui 3 kegiatan observasi dan wawancara dengan metode: Pertama, wawancara bebas (mendatangi responden) saat-saat bekerja disawah atau di tempat lainnya. Kedua, wawancara tertulis di rumah responden bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga responden. Ketiga, wawancara bebas pada pertemuan-pertemuan yang diadakan bersama-sama dengan petugas/penyuluh dan anggota pesanggem. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga yang terkait, seperti Perum Perhutani setempat dan Pemerintah Daerah setempat.

Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan metode deskriptif/tabulasi dan kuantitatif/matematis dengan menggunakan alat bantu mesin hitung Casio fx-3600 dan Computer IBS Multi Display.

Konsep Operasional

Distribusi pemilikan lahan dan pendapatan diartikan sebagai bagaimana total luas lahan dan total pendapatan RT pesanggem secara keseluruhan terbagi diantara kelompok-kelompok RT pesanggem Perhutanan Sosial. Kriteria yang digunakan untuk menentukan RT adalah mereka yang "makan dari satu dapur". Pesanggem adalah sebutan untuk anggota kelompok tani hutan yang menggarap lahan Perhutanan Sosial.

Untuk mengkaji distribusi pemilikan lahan dan distribusi pendapatan digunakan analisis Gini Ratio (lampiran 8). Sedangkan tingkat kesejahteraan diukur dengan standar kebutuhan hidup minimum. Porf. Sajogyo (1977) menamakan batas kebutuhan hidup minimum itu dengan istilah "garis kemelaratan" (poverty line). Batas Kebutuhan hidup minimum tersebut adalah didasarkan konsumsi beras per kapita per tahun. Dengan batasan tersebut terdapat 3 katagori kelompok miskin masyarakat pedesaan, yakni bila pendapatan per kapita per tahun setara 340 kg beras termasuk katagori miskin, 240 kg beras termasuk katagori miskin sakali, 180 kg beras termasuk katagori paling miskin. Harga beras adalah harga beras yang berlaku di pasar kecamatan pada tahun 1989.

Total pendapatan RT merupakan penjumlahan dari: (1) Penerimaan bersih dari sawah selama tahun 1989 (2 kali panen) tanpa memperhitungkan Tenaga Kerja Keluarga, (2) Nilai produksi dari tanaman yang sudah menghasilkan baik yang dijual maupun dikonsumsi selama tahun 1989, (3) Nilai produksi ternak (daging dan telur) baik yang dijual maupun dikonsumsi selama tahun 1989, (4) Penerimaan bersih dari usaha dagang setahun, (5) Upah dari berburuh, dan (6) Penerimaan bersih dari hasil tumpangsari Perhutanan Sosial selama tahun 1989.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber dan Tingkat Pendapatan Stratum I

Sumber pendapatan stratum I berasal dari beternak, berburuh batu dan perhutanan sosial. Kontribusi terbesar terhadap total pendapatan berasal dari perkerjaan buruh batu (69%) kemudian diikuti oleh perhutanan sosial (19 %), ternak (7 %) dan dagang (5 %).

Satu hal yang menarik dari stratum ini adalah tidak ada satupun dari mereka yang bekerja sebagai buruh tani sebagaimana biasanya ditemukan di pedesaan. Mereka lebih tertarik bekerja sebagai buruh batu. Upah yang mereka terima bervariasi. Pada umumnya mereka bekerja secara borongan dan berkelompok, sehingga tidak jarang dalam satu kelompok terdiri dari beberapa anggota keluarga (orang tua dan anak-anaknya). Kalau borongan per kelompok upah, yang mereka terima bervariasi yaitu Rp 5 000.- per minggu, Rp 8 000.- per minggu, sampai Rp 30 000.- per minggu.

Perhutanan Sosial yang mereka sebut sebagai sumber pendapatan pokok kedua, mereka anggap sebagai "tambahan penghasilan", meskipun keadaan fisik lahan tidak mendukung predikat tersebut. Ada tendensi bahwa mereka haus lahan, sehingga meskipun kondisi fisik lahan tidak banyak menjanjikan perbaikan hidup, tetap mereka garap sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pihak Perhutani. Ternyata, Perhutanan Sosial mampu memberikan kontribusi sebesar 19 % dan merupakan penyumbang terbesar kedua.

Ternak sebagai sumber pendapatan ketiga memberi kontribusi sebesar 7 %. Dari 17 RT hanya 2 RT yang tidak memiliki ternak. Jenis ternak yang dimiliki antara lain ; ternak unggas (ayam kampung, entok) dan ruminansia kecil (kambing). Sistem pemeliharaannya dilepas bebas di alam terbuka. Hasil yang dijual berupa daging dan telur. Kadang-kadang pada saat hajatan (menyunat, mengawinkan anak) mereka membelah ternaknya.

Dagang merupakan sumber pendapatan terkecil. Kecilnya kontribusi dari sektor ini dapat dimengerti karena dari 17 RT hanya 1 RT yang terlibat didalamnya. Jenis dagangannya berupa sayuran yang dijual ke pasar kecamatan, kue basah dan warung keperluan sehari-hari.

Dengan berbagai sumber pendapatan di atas, maka pendapatan rata-rata stratum ini per RT selama tahun 1989 adalah sebesar Rp-676 553.- (kondisi tanpa proyek (TP)) dan Rp 837 469.- (kondisi dengan proyek (DP)). Masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pendapatan rata-rata RT stratum II dan III.

Sumber dan Tingkat Pendapatan Stratum II

Responden yang termasuk golongan ini berjumlah 29 RT. Rata-rata pemilikan lahan (sawah) per RT relatif sangat sempit yaitu hanya 0.09 Ha. Itulah sebabnya mereka juga harus bekerja di luar pertanian agar mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup RTnya. Berbeda dengan stratum I, pada umumnya mereka memiliki lahan kebun kopi, cengkeh, kelapa disamping tanaman palawija (ketela pohon).

Penyumbang terbesar terhadap total pendapatan adalah ternak sebesar 21 %. Penyumbang berikutnya yang besarnya tidak jauh berbeda adalah buruh batu dan perhutanan sosial masing-masing 20-%. Sedangkan kebun, sawah dan dagang masing-masing memberikan kontribusinya sebesar 17 %, 16 % dan 10 %.

Dalam stratum ini juga tidak ada RT yang bekerja sebagai buruh tani. Biasanya petani gurem adalah sekaligus juga buruh tani, tapi disini tidak. Mereka lebih senang bekerja sebagai buruh batu dengan variasi upah seperti dijelaskan sebelumnya.

Dari 29 RT, hanya 12 RT (14 %) yang terlibat dalam pekerjaan buruh batu. Mereka yang tidak terlibat dalam pekerjaan ini, cenderung "terikat" pada sawah dan kebunnya. Responden yang bekerja sebagai buruh batu adalah mereka yang pendapatan dari sawahnya relatif rendah dan atau mereka yang tidak memiliki kebun. Dengan berbagai sumber pendapatan di atas maka diperoleh tingkat pendapatan rata-rata RT stratum ini selama tahun 1989 sebesar Rp 578 510.- (TP) dan Rp 733 472.- (DP). Lebih rendah dibanding tingkat pendapatan rata-rata stratum I. Hal ini disebabkan RT stratum I lebih bebas mencari sumber nafkah di luar sektor pertanian terutama dari pekerjaan buruh batu, sedangkan

stratum II agak terikat pada lahannya yang dianggap sebagai sumber pencaharian pokok.

Sumber dan Tingkat Pendapatan Stratum III

Responden yang termasuk dalam golongan ini hanya 5 RT (9 %). Sawah yang mereka anggap sebagai sumber mata pencaharian pokok ternyata hanya memberikan kontribusi sebesar 18 % (urutan ketiga). Total luas sawah yang dimiliki seluruh RT 1.25 Ha. rata-rata pemilikan lahan per RT dan per pemilik masing masing .25-ha.

Penyumbang terbesar adalah buruh batu (34 %). Kemudian berturut-turut diikuti oleh kebun (19 %), Perhutanan Sosial (18 %) dan ternak (11 %).

Perhutanan Sosial mereka anggap hanya sebagai pekerjaan sampingan", ikut menggarap hanya sekedar ikut teman, turut menghidupkan hutan dan karena bujukan petugas Perhutani, sehingga ekuivalen pada waktu pembukaan lahan, hanya ibu RT lah yang mengelola lahan perhutanan sosial seperti halnya merumput, dan lain-lain. Itupun hanya mereka yang lakukan apabila mendapat teguran dari petugas Perhutani. Namun demikian perhutanan sosial telah memberikan kontribusi yang cukup berarti hampir sama dengan penyumbang terbesar kedua.

Tingkat pendapatan rata-rata RT stratum ini sebesar Rp 581 50.- (TP) dan Rp 705 750.- (DP). Masih lebih rendah dibanding stratum I, tapi lebih tinggi dari stratum II.

Sumber dan Tingkat Pendapatan Stratum IV

Responden yang termasuk dalam stratum ini hanya 2 RT (4 %). Kebun merupakan penyumbang terbesar terhadap total pendapatan yaitu mencapai 42 %, diikuti oleh sawah 36 %, ternak 12 % dan perhutanan Sosial 10 %.

Total luas kebun yang dimiliki oleh 2 RT ini sama dengan .12 ha. Masing-masing RT memiliki 0.14 ha dan 0.98 ha. Jenis tanaman yang diusahakan sama dengan strata terdahulu. Sedangkan total luas sawah masing-masing RT adalah 0.63 Ha dan 0.70 Ha.

Mereka tidak ada yang bekerja sebagai buruh batu. Hal ini mendukung pernyataan yang diuraikan sebelumnya akan ada "ketertarikan" pesanggem terhadap sawah. Tingkat pendapatan rata-rata RT stratum ini sebesar Rp 1 011 250.- (TP) dan Rp 1 125 738.- (DP). Jauh di atas strata I, II dan III.

Distribusi Pemilikan Lahan

Masalah pemilikan lahan berkaitan dengan masalah distribusi pendapatan, kekayaan, berbagai kesempatan ekonomi dan

penguasaan politik. Kosentrasi pemilikan oleh sebagian kecil masyarakat dianggap sebagai ketimpangan yang sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Lebih lanjut masalah ini akan menjurus kearah proses polarisasi penguasaan lahan. Di satu pihak terdapat sejumlah kecil masyarakat yang menguasai sebagian besar lahan yang ada (petani luas komersial), dan dilain pihak terdapat sejumlah besar masyarakat yang menguasai hanya sebagian kecil lahan yang ada (masyarkat tuna kisma, buruh tani tak berlahan dan atau petani gurem).

Polarisasi tersebut telah terjadi pada penelitian ini, dimana 2 RT (4 %) menguasai lahan 1.33 ha (25 %), 5 RT (9 %) menguasai lahan 1.25 ha (24 %), 29 RT (55 %) menguasai lahan 2.65 ha (51 %) dan 17 RT (32 %) tidak memiliki lahan (tuna kisma). Agar lebih jelas lihat lampiran 3. Suatu ketimpangan yang relatif tinggi.

Dari perhitungan Gini Ratio diperoleh angka Gini sebesar 0.55 menurut Oshima (1975) angka Gini sebesar 0.5 menunjukkan ketimpangan berat. Angka Gini akan lebih bermakna bila dibandingkan dengan angka Gini pembanding dari hasil penelitian berdasarkan perbedaan waktu dan atau tempat. Oleh karena itu angka tersebut akan dibandingkan dengan hasil penelitian Wiradi dan Makali pada tiga desa yang relatif dekat dengan desa penelitian ini (sekitar 27 KM) yakni Desa Kebangan, Desa Wanarata dan Desa Rowosari. Angka Gini distribusi pemilikan tanah pada tiga desa tersebut masing-masing 0.84, 0.61, 0.85. Ternyata pemilikan lahan di desa Darmakradenan relatif lebih baik dibanding di tiga desa tersebut.

Distribusi Pendapatan

Dalam uraian terdahulu telah disebutkan bahwa terdapat hubungan antara luas pemilikan lahan dengan kebebasan mencari sumber pendapatan di luar pertanian. Artinya ada "keterikatan" terhadap sawah yang dimiliki pada luasan tertentu. Semakin luas lahan yang dimiliki semakin enggan pemiliknya untuk meninggalkannya, semakin kuat "keterikatan" itu. Kelihatannya, fenomena inilah yang mencirikan perbedaan distribusi pendapatan antar strata. Hasil perhitungan Gini Ratio distribusi pendapatan memberikan angka yang berbeda antara kondisi tanpa proyek (TP) dengan kondisi dengan proyek (DP), masing-masing 0.38 dengan proyek 0.35.

Bila dibandingkan dengan angka Gini distribusi pendapatan yang diperoleh dari hasil penelitian Mintoro (1983) pada tiga desa tadi masing-masing 0.47, 0.53 dan 0.60, maka distribusi pendapatan pada penelitian ini baik kondisi TP maupun kondisi DP relatif lebih baik dan menurut kriteria Oshima (1975) termasuk dalam ketimpangan moderat.

Analisis Tingkat Kemiskinan

Selain distribusi pendapatan, masih ada lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang

kita kenal dengan tingkat kemiskinan absolut (*absolut poverty*). Tingkat ini diukur dengan standar kebutuhan minimum, seperti yang dijelaskan pada halaman terdahulu.

Berdasarkan kategori diatas, kita dapat menganalisa tingkat kemiskinan pada kondisi TP dan kondisi DP.

1. Kondisi Tanpa Proyek (TP)

Pada kondisi ini hanya sekitar 36 % dari total RT yang berada di atas garis kemiskinan, sedangkan 64 % lainnya di bawah garis kemiskinan dengan perincian ; 15 % termasuk kategori paling miskin, 17 % termasuk kategori miskin sekali dan 32 % miskin. Suatu keadaan yang relatif timpang, kelompok paling miskin 50 % berada pada stratum I, 38 % pada stratum II, 12 % pada stratum III dan pada stratum IV tidak ada.

Kelompok paling miskin 33 % berada pada stratum I, 56 % pada stratum II, 11 % pada stratum III dan tidak ada pada stratum IV. Kelompok miskin 18 % berada pada stratum I, 70 % pada stratum III dan tidak ada pada stratum IV.

Sedangkan kelompok RT yang berada di atas garis kemiskinan 37 % berada pada stratum I, 47 % pada stratum II, 5% pada stratum III dan 11 % pada stratum IV. Bila bahasan dipertegas pada masing-masing strata, maka stratum I terdapat pada semua kategori. Akan tetapi mereka lebih banyak berada di atas garis kemiskinan (sebesar 41 %) dan selebihnya sekitar 59 % lagi masih berada di bawah garis kemiskinan dengan perincian 23 % berada pada kelompok paling miskin, 18 % pada kelompok miskin sekali dan 18 % pada kelompok miskin.

Pada stratum II, 31 % RT berada di atas garis kemiskinan (masih lebih rendah dibanding stratum I), 69 % lagi masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan perincian 10 % pada kelompok paling miskin (lebih rendah dari stratum I), 17 % pada kelompok miskin sekali (hampir sama dengan stratum I) dan 41 % pada kelompok miskin. Dibandingkan dengan stratum I, stratum II relatif lebih timpang.

Pada stratum III, penyebarannya relatif lebih merata pada semua kategori. Masing-masing 20 % kelompok paling miskin dan miskin sekali, 40 % miskin dan hanya 20 % diatas garis kemiskinan. Stratum III relatif lebih timpang dibanding strata I maupun strata II. Khususnya untuk stratum IV semua berada diatas garis kemiskinan.

2. Kondisi Dengan Proyek (DP)

Kelompok paling miskin yang pada kondisi TP sebesar 15 % akhirnya tidak ada lagi pada kondisi DP. Kelompok miskin sekali secara prosentase dari total RT tidak mengalami perubahan. Hanya

saja perubahan terjadi pada masing-masing strata, yakni; stratum II (dari 17 % menurun menjadi 14 %), strata III (dari 20 % meningkat menjadi 40 %.

Pada kelompok miskin terjadi penurunan dari 32 % (TP) menjadi 23 % (DP). Masing-masing strata mengalami perubahan; strata I tetap 17 %, strata II menurun dari 41 % (TP) menjadi 31 % (DP), strata III dari 40 % (TP) menjadi tidak ada (DP).

Pada kelompok RT yang berada di atas garis kemiskinan, terjadi peningkatan sekitar 39 %. masing-masing strata mengalami perubahan ; strata I meningkat sekitar 36 %, strata II meningkat sekitar 40 %, strata III meningkat sekitar 67 % dan strata IV tetap. Peningkatan terbesar terjadi pada strata III.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehadiran Perhutanan Sosial telah membawa peningkatan kesejahteraan terhadap RT peserta proyek/pesanggem, karena tingkat pendapatan meningkat, distribusi pendapatan relatif lebih baik, tingkat kemiskinan berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Semua hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini secara deskriptif/tabulasi dan kuantitatif/matematis terbukti benar. Tingkat pendapatan rata-rata RT pesanggem (peserta proyek) pada semua strata mengalami peningkatan. Pada stratum I meningkat sebesar 19 %, stratum meningkat sebesar 21 %, stratum III meningkat sebesar 18 % dan stratum IV meningkat sebesar 10 %.

Kontribusi Proyek Perhutanan Sosial (SFP) terhadap total pendapatan pada masing-masing strata memegang peranan penting karena paling tidak ia menempati urutan ketiga terbesar. Semakin besar luas lahan, semakin kecil kontribusi SFP terhadap total pendapatan.

Distribusi pendapatan baik antara stratum maupun diantara seluruh RT mengalami perbaikan. Gini Ratio pada kondisi TP sebesar 0.38 menjadi relatif lebih merata pada kondisi DP yakni 0,35. Semakin mendekati nol semakin baik, sebaliknya semakin mendekati satu distribusi semakin timpang.

Tingkat kemiskinan pada masing-masing stratum mengalami penurunan, sebaliknya jumlah RT yang berada di atas garis kemiskinan meningkat. Prosentase RT yang berada di bawah garis kemiskinan pada kondisi TP sebesar 64 % , pada kondisi DP berkurang menjadi 42 %. Prosentase RT yang berada di atas garis kemiskinan meningkat dari 36 % (TP) menjadi 58 % (DP). Berarti kehadiran SFP membawa peningkatan kesejahteraan peserta proyek tersebut sejalan dengan misi Perum Perhutani yang kedua.

Masalah Khusus Perhutanan Sosial

Ada tendensi bahwa semakin luas pemilikan lahan, semakin terikat mereka terhadap lahan miliknya tersebut dan semakin besar pula curahan perhatian terhadap sawahnya. Sebagai konsekwensinya, maka perhatian yang diberikan terhadap pengelolaan/perawatan/pengamanan lahan perhutanan sosial semakin rendah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hanya RT yang tidak memiliki lahan (stratum I) dan sebagian stratum II yang agak serius memperhatikan lahan perhutanan sosial. Oleh karena itu pada masa kontrak berikutnya Perhutani perlu memperketat syarat-syarat pesanggem. Disarankan agar diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki lahan dan atau petani gurem yang benar-benar membutuhkan lahan tersebut, tidak bekerja sebagai buruh batu dan lain-lain. Ini semua demi kepentingan Perhutani.

Dilema Ketela Pohon

Sebagaimana dalam penandatanganan kontrak penggarapan antara RT pesanggem atau KTH dan pihak Perhutani antara lain tidak diizinkan untuk memanami lahan garapan dengan ketela pohon dengan alasan tanaman ini secara agronomis cepat menguruskan tanah. Namun karena kondisi fisik lahan yang sering disebut dengan "batu bertanah" membutuhkan keahlian tersendiri untuk memilih lahan diantara sela-sela batuan cadas untuk dapat ditanami. Kondisi ini sering membuat pesanggem frustrasi karena tanaman palawija yang ditanam terlalu sering mati. Maka sebagai langkah praktis dan sesuai dengan kesenangan mereka, tak peduli dengan aturan dan peraturan yang ada, mereka menanam ketela pohon. Karena tanaman ini mudah tumbuh, cepat menghasilkan dan sering dianggap sebagai "tanaman uang" dan dapat berperan sebagai "tabungan".

Anggapan tersebut ada benarnya bila kita hubungkan dengan keadaan lahan yang ada dan ternyata dari semua strata, ketela pohon merupakan penyumbang terbesar terhadap total pendapatan dari Perhutanan Sosial.

Ditambah lagi bahwa di sekitar lokasi terdapat 2 buah pabrik tapioka yang selalu siap menampung tanaman ini, baik berupa ketela maupun dalam bentuk gaplek. Jadi mereka tidak pernah mengalami kesulitan dalam hal pemasaran (penjualan) tanaman ketela ini. Dan pada umumnya mereka menjualnya dengan sistem "tebasan".

Kalau memang demikian halnya, maka pihak Perhutani harus segera tanggap terhadap dilema ini. Mengizinkan ketela pohon ditanam dalam jumlah tertentu diimbangi dengan pemupukan berat atau memberi alternatif pengganti tanaman tumpangsari lain, yang sesuai dengan keadaan fisik lahan. Bila alternatif pertama diambil, barangkali Perhutani bisa bertindak sebagai monopoli yang akan memasarkan selanjutnya ke pabrik-pabrik tapioka yang ada. Untuk itu kiranya perlu dilakukan feasibility studi lebih

lanjut. Daripada menonton mereka "bertani secara pot" di atas lahan "batu bertanah" yang dalam jangka panjang tidak menjamin tercapainya misi Perhutani yang kedua, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Satu hal yang sangat penting untuk dikaji kembali oleh pihak Perhutani adalah apakah penentuan jenis tanaman tumpangsari yang dianjurkan dilandasi dengan suatu penelitian ("*based on research*"). Ataukah hanya bersifat coba-coba? Hendaknya menerapkan suatu program haruslah mapan berdasarkan "basis research", karena objeknya adalah masyarakat pedesaan yang hidupnya "pas-pasan".

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1984. Dampak hutan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Jawa.
- Bratamihardja, M. 1987. Pelaksanaan Program Perhutanan Social Forestry di Perum Perhutani. Dalam Bungan Rampai Perhutanan Sosial. Buku IV. Perum Perhutani. Departemen Kehutanan.
- Birowo, A. T. dan Irlan Sujono. 1976. Distribusi Pendapatan di Pedesaan Padi Sawah di Jawa Tengah. Prisma No. 1, Februari 1976.
- Kartasubtara, Junus. 1988. Tinjauan Tentang Program Social Forestry di Indonesia. Makalah Utama Diskusi Panel Social Forestry. IPB. Bogor.
- Kasryno, F. 1983. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia. Studi Dinamika Pedesaan. Yayasan Penelitian Survey Agro Ekonomi. Bogor. Indonesia.
- Mintoro, Abunawan. 1983. Distribusi pendapatan. Studi Dinamika Pedesaan - Survey Agro Ekonomi.
- Oshima, T. 1975. Perspectives in Income Distribution Research. Disampaikan dalam Seminar Mengenai Distribusi Pendapatan, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi Asia Tenggara dan Timur. Tokyo 16 - 20 Desember 1974. Dimuat dalam Proceeding, Volume 1, juli 1975.
- Sajogyo. 1977. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan. IPB. Bogor.
- Sinaga, R. dan Benjamin White. 1979. "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural". HIPIS, Kongres ke III, Malang.
- Wiradi, Gunawan; dan Makali. 1983. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan, Studi Dinamika Pedesaan - Survey Agro Ekonomi.